

Jokowi Resmi Anugerahkan 6 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA (IM) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2023 kepada keenam tokoh dari berbagai daerah yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/11).

Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 115/TK/Tahun 2023 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 6 November 2023.

Keenam tokoh yang diberikan gelar Pahlawan Nasional dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2023 tersebut adalah: Almarhum Ida Dewi Agung Jambé (Bali), Almarhum Bataha Santiago (Sulawesi Utara), Almarhum M Tabrani (Jawa Timur), Almarhum Ratu Kalinyamat (Jawa Tengah), Almarhum KH Abdul Chalim (Jawa Barat), dan Almarhum

KH Ahmad Hanafiah (Lampung).

Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh para ahli waris dari para tokoh yang sekaligus mewakili para penerima gelar dan penghargaan.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Jokowi diikuti tamu undangan lainnya kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional Tahun 2023.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. ● mei

Dewas Periksa Ketua KPK Periksa Firli Bahuri pada 14 November 2023

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan jadwal pemanggilan Ketua KPK Firli Bahuri.

Pemanggilan tersebut terkait permintaan klarifikasi dugaan pelanggaran etik berupa pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo dan pertemuan dengan pihak berperkara di lembaga antirasuah.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyatakan, pihaknya telah membuat jadwal permintaan klarifikasi terhadap Firli pada Selasa pekan depan.

"Akan diperiksa Selasa tanggal 14 November 2023 jam 10.00 WIB," kata Albertina kepada wartawan, Jumat (10/11).

Perlu diketahui, jadwal tersebut sebagaimana permintaan Firli Bahuri. Dalam pemanggilan pertama terkait kasus tersebut, Firli meminta untuk dijadwalkan ulang setelah 8 November 2023.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewas KPK, Samsuddin Haris buka suara ihwal permintaan Firli Bahuri untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan etik setelah 8 November 2023. Menurutnya, tanggal tersebut terlalu jauh.

"Beliau sih minta sesudah tanggal 8 (November), bagi saya khususnya tanggal 8 itu kejauhan, kelamaan!" kata Haris di Kantor Dewas KPK, Jalan Haji R. Rasuna Said Kav. C1, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 27 Oktober 2023.

Haris menjelaskan, saat ini Dewas bukan hanya menangani kasus dugaan pelanggaran etik yang menyeret pimpinan KPK. Jika pemeriksaan tidak kunjung dilakukan maka akan menghambat kinerja Dewas KPK.

"Kita Dewas ingin cepat-cepat selesai kasus-kasus ini," ujarnya. ● han

Ambulans Bawa Wisatawan saat Libur Nataru Bakal Ditindak

BOGOR (IM) - Polisi akan menindak tegas kendaraan prioritas seperti ambulans, yang kedapatan mengangkut wisatawan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Desember 2023.

"Kalau misalkan itu kosong, membawa teman-teman yang berwisata atas nama ambulans itu akan kita tindak tegas," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Jumat (10/11).

Ia menyebutkan, penindakan yang akan dilakukan berupa tilang, Semua kelengkapan kendaraan dan lainnya

akan diperiksa petugas di lapangan.

"Dalam artian kita tilang, kendaraannya, kelengkapan administrasinya akan kita tindaklanjuti," tuturnya.

Namun, jika ambulans membawa atau menjemput pasien pihaknya akan memberikan pengawalan. Sehingga, pasien dapat segera mencapai tujuan untuk mendapatkan penanganan medis atau lainnya.

"Misalkan lewat itu mengangkut pasien ataupun menjemput itu akan kita bantu hingga kawal," katanya. ● lus

Hanya 1 dari 18 Parpol yang Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan

JAKARTA (IM) - Kolasi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan menyoroti partai politik yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan 30 persen caleg perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) DPR RI.

Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah diumumkan KPU RI 3 November lalu, 17 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 gagal memenuhi kewajiban afirmasi perempuan itu.

"Hanya 1 parpol yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen pada semua DCT di 84 dapil, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," kata Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay, dalam rilis hasil analisis DCT koalisi Kamis (9/11).

Netgrit yang merupakan salah satu representasi kolasi, menambahkan, PKB dan PDI-P menjadi partai politik paling bermasalah dengan keterwakilan perempuan terbanyak. PKB gagal memenuhi 30 persen caleg perempuan di 29 dapil, disusul PDI-P 26 dapil.

Setelahnya, berturut-turut adalah Demokrat 24 dapil, Golkar dan Gerindra 22 dapil, PKN 21 dapil, Partai Gelora 19 dapil, PAN 17 dapil, Nasdem dan PBB 16 dapil, PPP 12 dapil, Garuda 9 dapil, Partai Buruh 6 dapil, Perindo dan Partai Ummat 5 dapil, lalu PSI 4 dapil.

"Data ini sangat tidak sesuai dengan deklarasi pemilu berintegritas yang kemarin dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Karena KPU jelas melakukan pembiaran

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PRESIDEN PIMPIN UPACARA ZIARAH NASIONAL

Presiden Jokowi (kiri) berdoa bersama Wapres Ma'ruf Amin (kanan) usai memimpin Upacara Peringatan Ziarah Nasional untuk memperingati Hari Pahlawan 2023 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Jumat (10/11).

Korupsi APD di Kemenkes, KPK Cegah Lima Orang Berpergian ke Luar Negeri

KPK cegah 5 orang berpergian ke luar negeri terkait korupsi APD di Kemenkes, yakni Budi Sylvana, Hermansyah, Satrio Wibowo, Ahmad Taufik A dan Isdar Yusuf.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan lima orang untuk dicegah bepergian ke luar negeri. Hal ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun anggaran 2020-2022.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan hal tersebut melalui keterangan tertulis. Surat pengajuan pun sudah dilay-

angkan ke Dirjen Imigrasi Kemendikham RI.

"Terkait dengan dibutuhkan keterangan beberapa pihak untuk mendukung proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes RI, saat ini KPK telah ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemendikham RI terhadap lima orang untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri," kata Ali kepada wartawan, Jumat (10/11).

"Adapun pihak dimaksud

yaitu dua ASN dan tiga pihak swasta," ujarnya.

Menurut Ali pencegahan dilakukan untuk enam bulan ke depan, namun tidak menutup kemungkinan pencegahan tersebut akan diperpanjang periodenya.

"Sikap kooperatif dari pihak-pihak tersebut di perlukan untuk mempercepat proses pemberkasan perkara," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, kelima orang yang dicegah dalam perkara tersebut adalah, Budi Sylvana dan Hermansyah selaku ASN, Satrio Wibowo dan Ahmad Taufik selaku swasta, serta A. Isdar Yusuf selaku advokat.

Adapun nilai proyek pengadaan APD itu mencapai Rp3,03 triliun. Jumlah terse-

but ditujukan untuk pengadaan lima juta set APD dalam pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

"Jadi untuk sementara kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah," kata Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK.

Ali menyebutkan, nilai tersebut sebagai temuan awal penyidikan kasus yang dimaksud. Ali pun tidak menutup kemungkinan jumlah kerugian negara akan bertambah.

"Tentu akan kami terus

kembangkan lebih lanjut," ujarnya.

Informasinya, tersangka dalam kasus ini lebih dari satu orang. Kasusnya sudah masuk tahap penyidikan KPK. "Saya kira lebih dari satu yg ditetapkan tersangka," kata Ali.

Kendati demikian, Ali enggan menyebutkan identitas para pihak yang telah ditetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

"Identitasnya akan disampaikan ketika penyidikan cukup dan dilakukan penahanan," ujar Ali. ● han

Komisi I DPR Sebut Persyaratan Administrasi Calon Panglima TNI Agus Subiyanto Lengkap

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan, persyaratan administrasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI, sudah lengkap.

Verifikasi fisik berkas administrasi calon Panglima TNI sudah lengkap, ujar Meutya dalam keterangannya, Jumat (10/11).

Selanjutnya tahap verifikasi administrasi berkas calon Panglima TNI secara fisik akan dilakukan pada Senin (13/11) pekan depan. Setelah itu, Komisi I DPR baru akan melaksanakan *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Agus Subiyanto.

"Kita akan periksa berkas fisik administrasi sebelum memulai *fit and proper test*," kata Meutya.

Untuk diketahui, berkas administrasi yang diverifikasi terdiri dari riwayat hidup, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), KTP, kartu keluarga, LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 2022, SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak 2022, dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Jenderal Agus Subiyanto selangkah lagi akan menapaki puncak kariernya setelah di-

tunjuk menjadi calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang pensiun akhir November 2023.

Agus akan menjalani *fit and proper test* setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengirim surat presiden (surpres) ke DPR pada akhir Oktober 2023.

Di sisi lain, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pencalonan Agus Subiyanto dinilai beraroma nepotisme. Sebab, keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan dekat. Tepatnya, ketika Agus menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009-2011.

Pada periode tersebut, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain diduga sarat nepotisme, pencalonan Agus juga dianggap kental akan dimensi politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Agus menduduki posisi KSAD sebenarnya masih berumur jagung.

Ia baru dilantik Jokowi menjadi KSAD menggantikan Jenderal Duding Abdurachman pada 25 Oktober 2023. Belum sepekan mengemban jabatan KSAD, Agus Subiyanto ditunjuk oleh Jokowi menjadi calon tunggal Panglima TNI. Itu diketahui dari isi surpres yang ditujukan kepada DPR pada 31 Oktober 2023. ● han



PENYAMPAIAN MAKLUMAT PRESIDUM KONSTITUSI

DPD RI menyelenggarakan kegiatan Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi dengan tujuan menyampaikan kepada MPR RI tentang Pengembalian UUD 1945 Sebelum Amandemen. Acara yang berlangsung Jumat (10/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta itu dihadiri Ketua DPD RI, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Ketua Dewan Konstitusi, dan beberapa ormas.

maka KPU sudah seharusnya menolak pendaftaran caleg oleh partai," kata Titi kepada wartawan, Selasa (7/11).

"KPU tidak bisa berdalih bahwa ketentuan tersebut tidak memuat sanksi sehingga tidak bisa ditegakkan. Mengingat ketentuan tersebut adalah persyaratan dalam pengajuan calon. Sehingga, jika ada partai yang tidak mengajukan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, maka sudah semestinya pendaftarannya tidak dapat diterima," tegasnya.

Ini sama seperti halnya, KPU tidak bisa menerima calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) usungan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden, sebab keterpenuhan ambang batas itu merupakan syarat

pengajuan bakal capres-cawapres.

Sementara itu, jauh sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah mengesampingkan opsi disqualifikasi sebagaimana dimaksud Titi. Hasyim berkilah, tak ada konsekuensi soal pelanggaran atas amanat memenuhi hak afirmasi politik untuk perempuan. Ia menganggap, opsi disqualifikasi itu adalah sanksi bagi partai politik yang gagal memenuhi 30 persen caleg perempuan di suatu dapil.

"Di UU tidak ada sanksinya. Kalau di UU tidak ada sanksi, KPU kan tidak bisa memberikan sanksi," ujar Hasyim kepada wartawan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pembanas), Senin (9/10). ● mei



PERINGATAN HARI PAHLAWAN DI LAUT

Mensos Tri Rismahrini (kiri) selaku inspektur upacara bersiap melarung karangan bunga saat upacara tabur bunga di laut dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 di Perairan Jakarta, Jumat (10/11).